

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta, Chandra Pratama, 2002)
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006)
- Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Mei 2005).
- , *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya, Cet 3*, (Jakarta: Gramedia, 1991).
- , *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, 2001)
- , *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1985)
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta, Liberty, 1996)
- Anton F Susanto, *Teori-Teori Hukum dan Implementasinya dalam Wajah Peradilan Kita*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta Pers, Jakarta, 2003)
- Carl J. Friesrich, *Political Pathology, Man and His Government*. (Newyork:McGraw-Hill. 1966)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana* (Jakarta, Bina Aksara: 1987).
- , *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987)
- Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach: *Lehrbuch des geminin in Deutschland gultegen Peinlichen Rechts*, (Georg Friedrich Hayer's Verlag. Paragraf 20)

- Eddy OS Hiariej, *Ihwal Praperadilan*, (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (Jakara, Kompas, Rabu, 8 April 2015)
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Cet II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penentuan Dalam Proses Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991)
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition*, (St. Paul, Minn: West Publishing co. 1990)
- Husein Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991).
- J.S. Nye, *Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis*, (Jakarta, American Political Science Review, Vol. 61, No. 2, 1967)
- Jerome: *General Principles Of Criminal Law, Second Edition*, (Jakarta, The Bobbs-Merrill Company, Inc, 1960)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- KPK, *Prosedur Operasi Baku Kegiatan Penyidikan*, (Jakarta, tp, 2008)
- Lili Rasyidi & Ira Rasyidi. *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet ke VIII*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung, P.T. Alumni, 2007)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Mantovhani Reda dan Soewarsono, *POLRI dalam Optik Hukum di Indonesia* (Jakarta: CV. Malibu, 2004)
- Nanda Agung Dewantara, *Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cet 4*, (Bandung, Alumni, 1986)
- Peter Baehr, Peter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak Penyunting: *Instrumen Internasional Pokok Hak- Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1997)

Rhonda Wasserman, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, (Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, 2004)

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2007)

Seno Aji, *Hukum-hukum Pidana*, (Jakarta, Erlangga, 1984)

Soerjono Soekanto, -----, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010)

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, (Bandung : Alumni, 1982).

Soren Davidsen, et, all, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada tingkat Nasional*, (Jakarta: USINDO, 2007)

Sulistyo Basuki. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Penaku, 2010)

Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan. Data Kontemporer*, (Jakarta, LP3ES, 1983)

Teten Masduki dan Danang Widyoko, *Menunggu Gebrakan KPK*, (Jakarta, Jentera edisi 8 Tahun III Maret 2005)

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Juli 2001)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok
Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Makalah/Jurnal/Pidato

Johana Olivia Rumajar, *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana
Korupsi*, (Jakarta, Jurnal Lex Crimen, Vol. III, No. 4, Agustus-November
2014)

Mr. Lie Oen Hock, *Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta, PIDATO
diucapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar
Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia
di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959)

Putra Erawan M, *Membangun KPK di Daerah*, (Denpasar, Makalah, 2008)

Internet

Abdul Rahman Saleh, di unduh dari www.arsip.pontianakpost.com tanggal, 12
Desember 2017.

Cornelius Tangkere di unduh dari [www.legalitas.org/?./problematika-dan-urgensi-
pengadilan-tindak-pidana-korupsi](http://www.legalitas.org/?./problematika-dan-urgensi-pengadilan-tindak-pidana-korupsi), tanggal 2 Desember 2017

Indriyanto Seno Haji di unduh dari [http://www.hukum
online.com/detail.asp?id=15775&cl=Berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15775&cl=Berita), tanggal 13 November 2017

Iwan Setiawan, Hakim Batalan SP3 Kasus Korupsi Bupati Jepara, di unduh dari
<https://news.akurat.co> tanggal 20 November 2017

Mampukah Berantas Korupsi?, di unduh dari www.hukumonline.com, tanggal 20
November 2007

Mengadili eksistensi pengadilan tipikor di unduh dari
www.legalitas.org/?q=node/44, tanggal 9 November 2017

Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi, di unduh dari
<http://www.hukumonline.com> tanggal 20 November 2017

Shanti Rachmadsyah, SP3, di unduh dari
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl62>

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Surat Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 1 11212005; Nomor: KEP-IAIJ.A1121200 Tahun 2005 tentang Kerjasama antara KPK dan Kejaksaan RI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.

